

**ANALISIS PAJAK SEKTOR PARIWISATA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**ANNISA FIRLIA
NIM : 17622136**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

**ANALISIS PAJAK SEKTOR PARIWISATA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

NAMA : ANNISA FIRLIA

NIM : 17622136

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PAJAK SEKTOR PARIWISATA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Nama : Annisa Firlia
NIM : 17622136

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Rachmad Chartady, S.E., M.Ak
NIDN. 1023049101/Asisten Ahli

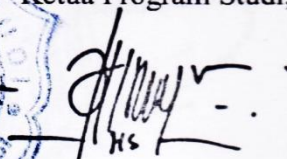
Pembimbing Kedua,



Andry Tonaya, S.E., M.Ak
NIDN. 8823900016/Asisten Ahli

Menyetujui,
Ketua Program Studi,




Hendy Satria, SE., M.Ak
NIDN. 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PAJAK SEKTOR PARIWISATA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**NAMA : ANNISA FIRLIA
NIM : 17622136**

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Rachmad Chartady, S.E., M.Ak
NIDN. 1023049101/Asisten Ahli

Sekretaris,

Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak. Ak. CA
NIDN. 1028117701 /Asisten Ahli

Anggota,

Marwati, S.P., M.M
NIDN. 1007077101/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 23 Agustus 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,

Charly Marlinda, S.E., M.Ak., CA.
NIDN. 1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Nama : Annisa Firlia
NIM : 17622136
Tahun Angkatan : 2017
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,14
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata 1
Judul Skripsi : Analisis Pajak Sektor Pariwisata Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 23 Agustus 2021

Penyusun,



ANNISA FIRLIA
NIM: 17622136

HALAMAN PERSEMBAHAN



Kata pertama yang bisa ku ucapkan adalah “Alhamdulillah”
Sembah sujud dan syukurku kepada-Mu ya Allah SWT atas kasih sayang dan
karunia-Mu

Telah membekalkan ku dengan ilmu yang bermanfaat
Dan memberikan kemudahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan
Shalawat beserta salam ku limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW

Sebagai tanda terima kasih yang tiada terhingga, Ku persembahkan karya skripsi
ini untuk keluargaku tercinta terutama Bapak dan Mamak,

Bapak Arif Firgana

Dan

Ibu Dahlia

Yang tidak pernah berhenti menyirami ku kasih sayang, memberikan dukungan moral maupun materi, selalu mendoakan ku disetiap sujudnya. Dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat . Semoga ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan harapan kedua orangtuaku dan keluarga untuk mendapat kesuksesan, dikehidupan dan menjadi kebanggaan bagi keluarga.

Dan juga dengan bangga ku persembahkan skripsi ini kepada Almamaterku
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

HALAMAN MOTTO

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.”

(QS. Al Fatihah Ayat 5)

“Dan mohonlah pertolongan (Kepada Allah SWT) dengan sabar dan shalat. Dan (Shalat) itu sungguhlah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”

(QS. Al Baqarah Ayat 45)

“Time Is Free, But It's Priceless”

“stay positive, work hard, make it happen”

***“Di Setiap Kesulitan Selalu Ada Kemudahan.
Setiap Masalah Selalu Memiliki Solusi”***

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PAJAK SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi.

6. Bapak Rachmad Chartady, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberi arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Andry Tonaya, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tak pernah lelah dalam memberikan arahan dan bimbingan.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Seluruh anggota keluargaku yang terus memberi dukungan mereka kepada penulis.
10. Gatri Wahyu Maulana Putra dan Teman-teman seperjuangan angkatan 2017, yang terus menemani dan memotivasi penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tak dapat dituliskan satu-persatu, terimakasih atas semuanya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 23 Agustus 2021

Penyusun,

Annisa Firlia

NIM:17622136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Teori.....	9
2.1.1 Definisi Akuntansi.....	9
2.1.2 Akuntansi Sektor Publik.....	10

2.1.3 Pariwisata	12
2.1.3.1 Pengertian Pariwisata	12
2.1.4 Pajak Sektor Pariwisata	19
2.1.5 Pendapatan Daerah	21
2.1.5.1 Pendapatan Asli Daerah	21
2.1.5.2 Dana perimbangan.....	28
2.1.6 Kontribusi, Pertumbuhan, Dan Efektivitas	31
2.1.6.1 Pengertian kontribusi.....	31
2.1.6.2 Pertumbuhan.....	33
2.1.6.3 Pengertian Efektivitas	34
2.2 Kerangka Pemikiran.....	35
2.3 Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Jenis Data	42
3.3 Teknik pengumpulan data.....	43
3.4 Teknik Pengelolaan Data	43
3.4.1 Menghitung Kontribusi Pajak Sektor Pariwisata.....	43
3.4.2 Mengukur Tingkat Pertumbuhan Pajak Sektor Pariwisata.....	44
3.4.3 Mengukur Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Sektor Pariwisata	45
3.5 Metode analisis data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Kota Tanjungpinang.....	47
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Tanjungpinang.....	48
4.1.2 Visi Dan Misi Kota Tanjungpinang	50
4.1.3 Gambaran Umum BPPRD Kota Tanjungpinang.....	51
4.1.4 Struktur Organisasi BPPRD	52
4.2 Analisis Data.....	53
4.2.1 Rasio Kontribusi	53
4.2.2 Rasio Pertumbuhan.....	59
4.2.3 Rasio Efektivitas.....	65
 BAB V PENUTUP	 73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Pajak Sektor Pariwisata Kota Tanjungpinang.....	5
Tabel 3.1	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	44
Tabel 3.2	Klasifikasi Kriteria Pertumbuhan.....	45
Tabel 3.3	Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	45
Tabel 4.1	Kontribusi Pajak Hotel	53
Tabel 4.2	Kontribusi Pajak Restoran	55
Tabel 4.3	Kontribusi Pajak Hiburan	57
Tabel 4.4	Pertumbuhan Pajak Hotel.....	60
Tabel 4.5	Pertumbuhan Pajak Restoran	61
Tabel 4.6	Pertumbuhan Pajak Hiburan	63
Tabel 4.7	Efektivitas Pajak Hotel.....	66
Tabel 4.8	Efektivitas Pajak Restoran	68
Tabel 4.9	Efektivitas Pajak Hiburan	70

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1	Grafik Kontribusi Pajak Hotel	53
Gambar 4.2	Grafik Kontribusi Pajak Restoran.....	55
Gambar 4.3	Grafik Kontribusi Pajak Hiburan.....	57
Gambar 4.4	Grafik Pertumbuhan Pajak Hotel	60
Gambar 4.5	Grafik Pertumbuhan Pajak Restoran	61
Gambar 4.6	Grafik Pertumbuhan Pajak Hiburan	63
Gambar 4.7	Grafik Efektivitas Pajak Hotel	66
Gambar 4.8	Grafik Efektivitas Pajak Restoran	68
Gambar 4.9	Grafik Efektivitas Pajak Hiburan	70

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
Lampiran 1 :	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (LRAPBD) Tahun 2016-2019
Lampiran 2 :	Rekapitulasi Data Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2019
Lampiran 3 :	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 4 :	Struktur Organisasi
Lampiran 5 :	Surat Selesai penelitian
Lampiran 6 :	Hasil Cek Plagiat

ABSTRAK

ANALISIS PAJAK SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG

Annisa Firlia, 17622136, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang
Annisafirlia1@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi, tingkat pertumbuhan, dan tingkat efektifitas pajak sektor pariwisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota tanjungpinang.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara, dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data target atau anggaran, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perhitungan kontribusi pajak sektor pariwisata terhadap PAD masing-masing rata-rata kontribusi menunjukkan kriteria sangat kurang yaitu pajak hotel (4,25%), pajak restoran 8,65%, dan pajak hiburan (2,44%). Pertumbuhan rata-rata setiap jenis pajak sektor pariwisata tahun 2016-2019 menunjukkan kriteria tidak berhasil (dibawah 30%). Yaitu pajak hotel (12,89%), pajak restoran (12,05%), dan pajak hiburan sebesar (18,90%). Efektivitas pajak sektor pariwisata kota tanjungpinang tahun 2016-2019 memiliki kriteria yang sangat efektif (menunjukkan angka diatas 100%). Yaitu pajak hotel (103,19%), kemudian pajak restoran (112,15%), dan pajak hiburan (107,91%).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah kota Tanjungpinang belum meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak sektor pariwisata yang potensial khususnya pajak hotel, restoran, dan hiburan. Peningkatan dan pemaksimalan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan Peningkatan ketegasan dan profesionalitas pemerintah dalam proses pemungutan maupun pembayaran pajak serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah (BPPRD) harus mampu mempertahankan peningkatan efektivitas pajak sektor pariwisata Kota Tanjungpinang.

Kata Kunci : Peningkatan, Pajak Sektor Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah

Dosen Pembimbing I : Rachmad Chartady, S.E., M.Ak.

Dosen Pembimbing II : Andry Tonaya, S.E., M.Ak.

ABSTRACT

ANALYSIS OF TOURISM SECTOR TAX IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) IN TANJUNGPINANG CITY

Annisa Firlia, 17622136, Accounting, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang
Annisafirlia1@gmail.com

This study aims to determine how big the contribution, growth rate, and level of tax effectiveness of the tourism sector to the increase in the local revenue of Tanjungpinang city.

The type of research used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out in the form of interviews, and literature studies. The source of the data used is secondary data in the form of target or budget data, reports on the realization of regional income and expenditure budgets as well as the calculation of the tourism sector tax contribution to PAD, each contribution average showing very poor criteria, namely hotel tax (4.25%), 8.65% restaurant tax, and entertainment tax (2.44%). The average growth of each type of tourism sector tax in 2016-2019 shows the criteria of not being successful (below 30%). They are hotel tax (12.89%), restaurant tax (12.05%), and entertainment tax (18.90%). The effectiveness of the Tanjungpinang city tourism sector tax in 2016-2019 has very effective criteria (showing numbers above 100%). They are hotel tax (103.19%), then restaurant tax (112.15%) and entertainment tax (107.91%).

The results of this study indicate that the Tanjungpinang city government has not increased and maximized local revenue originating from potential tourism sector taxes, especially hotel, restaurant and entertainment taxes. Increasing and maximizing local revenue can be done by increasing the firmness and professionalism of the government in the process of collecting and paying taxes and the Regional Tax and Levy Management Agency (BPPRD) must be able to maintain an increase in the effectiveness of the tourism sector tax in Tanjungpinang City.

Keywords: Increase, Tourism Sector Tax, Local Revenue

Supervisor I : Rachmad Chartady, S.E.,M.Ak.
Supervisor II : Andry Tonaya, S.E., M.Ak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia masuk kedalam kategori Negara dengan bentuk kepulauan terbesar didunia dengan beraneka ragam suku dan budaya serta keindahan alam. Sebagai Negara kepulauan, Perkembangan industri sektor pariwisata bukan hanya mendorong peningkatan pendapatan devisa negara, akan tetapi juga dapat menambah kesempatan dalam berusaha dan meminimalisir pengangguran di masyarakat dengan penciptaan lapangan pekerjaan (Rahma, 2013). Bahkan industri pariwisata selalu masuk dalam kategori tiga penyumbang paling besar devisa nasional Indonesia. Datangnya wisatawan ke daerah tujuan wisata (DTW) membawa kesejahteraan dan kemakmuran untuk penduduk diwilayah tersebut. Sama dengan sektor lain, Sektor pariwisata pun berdampak pada di suatu daerah. Besarnya dampak pariwisata bervariasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu negara ke negara lain (Sammen 2001). Menurut Salah Wahab (Salah, 2003) dalam buku berjudul *Tourism Management* "Pariwisata merupakan berbagai macam industri terbaru yang mampu menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi begitu pesat dalam hal penyediaan lapangan kerja, taraf hidup dan mendorong sektor-sektor produktif lainnya".

Banyaknya wisatawan yang berkunjung akan mendorong majunya industry pariwisata suatu daerah, oleh karena itu harus didukung dengan tingkat pemanfaatan daerah tujuan wisata (DTW) agar industri pariwisata dapat

berkembang dengan baik. elemen terpenting dari pariwisata adalah destinasi wisata utama. Seiring bertambahnya jumlah wisatawan, semakin banyak fasilitas pendukung wisata. Di pusat-pusat pemukiman wisata atau kawasan wisata, seperti restoran, seni pertokoan, pasar seni, dll. Fasilitas hiburan dan fasilitas hiburan. Dalam hal ini, industri pariwisata memberikan kontribusi pendapatan daerah. Komponen utama pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan dari pajak daerah bagian dari pajak daerah, hasil perusahaan daerah, pendapatan dari dinas, dan pendapatan lain yang termasuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang terkait. Dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peran pendapatan asli daerah (PAD) dalam pendapatan daerah, mencerminkan keberhasilan badan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dalam bentuk pajak dan retribusi. Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 menyatakan Daerah otonom dapat melakukan kegiatan promosi untuk meningkatkan jumlah wisatawan di daerahnya, selain itu pemerintah dan provinsi daerah otonom juga memiliki kewenangan terutama dalam bidang kepariwisataan yang salah satunya untuk menetapkan pedoman pembangunan serta pengembangan kepariwisataan.

Dalam UU No.10 tahun 2009, kepariwisataan diperlukan untuk meratakan peluang usaha serta memperoleh manfaat, dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik itu secara lokal, nasional, dan global. Pariwisata sebagai sektor ekonomi sangat penting dalam menyejahterakan masyarakat. Tingginya kesejahteraan masyarakat menjadikan pariwisata sebagai bagian yang wajib didapatkan dan dibutuhkan atau sebagai gaya hidup masyarakat, serta dapat

menarik jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya daerah lain. Dalam perkembangannya, industri pariwisata sangat berperan dalam mengembangkan UKM (Usaha Kecil Dan Menengah). Industry Pariwisata berpotensi menjadi instrument dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama penduduk yang berada disekitar daerah wisata melalui UKM (Usaha Kecil Dan Menengah).

Provinsi Kepulauan Riau memiliki letak yang strategis jika dilihat dari letak geografisnya dimana Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan (Kepulauan Natuna), dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapurayang terletak di jalur perdagangan dunia. sehingga Provinsi Kepulauan Riau memiliki Posisi Strategis. Provinsi ini adalah provinsi yang cukup berkembang pesat, letaknya yang sangat strategis memiliki daya tarik tersendiri bagi investor unggul dari berbagai sektor terutama sektor pariwisata. sektor pariwisata di provinsi ini merupakan sektor utama yang membantu pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Kepulauan Riau adalah pintu gerbang utama ke tiga pariwisata Indonesia setelah Bali dan Jakarta, tercatat hampir 2 juta wisatawan per tahun yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rangka mengembangkan potensi kawasan pariwisata, Maka pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menarik minat investor dan mempermudah investor yang berminat tersebut melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Diharapkan dengan demikian kepariwisataan dapat berkembang dengan baik. Kota Tanjungpinang merupakan kota yang syarat akan sejarah, budaya dan adat istiadat melayu sekaligus ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi tersebut kaya dengan

sejarah dan adat istiadat serta letak kota yang sangat strategis dijalur perdagangan dunia dan berdekatan dengan Negara tetangga menjadikan kota tanjungpinang salah satu tujuan wisatawan mancanegara.

Pemerintah Kota Tanjungpinang seringkali mengadakan event-event nasional dan internasional sepanjang tahun untuk menarik wisatawan misalnya Event Bahari Kepri, Festival Pulau Penyengat, Dragon Boat, dan festival lainnya. Berbagai macam obyek wisata yang ditawarkan oleh Kota Tanjungpinang mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata religi, wisata kuliner dan wisata lainnya. Obyek dan daya tarik wisata (ODTW) Kota Tanjungpinang cukup banyak dan bervariasi. Keindahan wisata alam, wisata budaya dan wisata modern Kota Tanjungpinang dapat terlestari dengan kesungguhan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan yang berkelanjutan, maka keberadaan kemegahan Masjid Raya Sultan Riau Penyengat, Makam Raja Raja di pulau Penyengat, tempat bersejarah lainnya dipulau penyengat, gedung Gonggong, Klenteng Sun Tekong, Vihara Patung Seribu, museum, dan adat-istiadat serta kesenian tradisionalnya dll, sampai sekarang masih terjaga / lestari.

Begitu juga dengan potensi keindahan alam pantai Tanjung siambang, wisata kuliner makanan khas Gonggong, Lakse, Otak-otak, dan makanan olah seafood lainnya. Potensi pariwisata yang sangat besar menjadikan sektor pariwisata menjadi salah satu sumber PAD yang terbesar di kota Tanjungpinang.

Dilihat dari data BPS 150 ribu lebih kunjungan wisatawan ke Tanjungpinang per tahun, dengan banyaknya wisatawan berkunjung ke Tanjungpinang memperkuat sektor pariwisata yang salah satu faktor strategis

penggerak pembangunan perekonomian daerah, maka program dan pengembangan sumber daya dan potensi pariwisata diharapkan memberikan sumbangan pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 1.1
Pajak Sektor Pariwisata Kota Tanjungpinang
Tahun 2019

NO	JENIS PAJAK	TARGET (Dalam Rupiah)	HASIL REALISASI (Dalam Rupiah)	WAJIB PAJAK (WP)
1.	Pajak Hotel	7,8 milyar	7,87 milyar	101 objek
2.	Pajak Restoran	14,7 milyar	16,37 milyar	1.295 objek
3.	Pajak Hiburan	4,4 milyar	4,63 milyar	147 objek

Sumber: BPPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2019

Jika dilihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa target pajak sektor Pariwisata khususnya Pajak hotel, restoran, dan hiburan realisasi penerimaannya selalu melebihi target yang telah ditetapkan khususnya yang tertinggi adalah pajak restoran dengan hasil realisasi sebesar Rp. 16,37 milyar dari target sebesar Rp. 14,7 milyar dengan jumlah wajib pajak sebanyak 1.295 objek. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah terutama dari pajak sektor pariwisata menunjukkan angka yang cukup tinggi, oleh karena itu sektor pariwisata perlu dikembangkan dan dikelola lebih baik lagi oleh pemerintah daerah.

Sektor pariwisata telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Tanjungpinang. Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang usaha pariwisata Kota Tanjungpinang yang menjadi sumber rujukan utama untuk memandu arah

pengembangan kepariwisataan Tanjungpinang. Maka peneliti akan meneliti mengenai Analisis Pajak Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah:

- a. Seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang?
- b. Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Tanjungpinang?
- c. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak sektor pariwisata kota Tanjungpinang?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah berguna untuk menghindari adanya berbagai masalah yang menyimpang atau perluasan pokok masalah agar penelitian tersebut dapat berjalan sesuai arah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup yang dibahas hanya meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.
- b. Penelitian ini hanya membahas pajak sektor pariwisata dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang.
- b. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Pajak Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang.
- c. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tanjungpinang.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature Akuntansi Sektor Publik (ASP).

- b. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat menjadi acuan dalam evaluasi dan pengembangan pajak sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang

- c. Manfaat Praktis

Penulisan ini bertujuan agar penelitian dapat menambah wawasan terkait dengan pajak sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan memahami proposal ini, penulis merasa perlu mengemukakan sistematika penulisannya yaitu:

- BAB I** : **Pendahuluan**, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II** : **Tinjauan Pustaka**, yang terdiri dari pembahasan terhadap teori- teori yang dapat digunakan sebagai rujukan terhadap masalah yang dikemukakan, kerangka pemikiran, hipotesis, dan juga penelitian terdahulu.
- Bab III** : **Metodologi penelitian**, dalam bab ini peneliti akan melakukan pembahasan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan juga jadwal penelitian.
- BAB IV** : **Hasil penelitian dan pembahasan**, pada bab ini penulis menyampaikan hasil analisis data yang telah dilakukan dan menjabarkan serta memberikan penjelasan analisisnya secara menyeluruh.
- BAB V** : **Penutup**, penulis akan merangkum secara keseluruhan bab dan kemudian menjadi kesimpulan dan disertai dengan saran-saran yang ditujukan kepada perusahaan yang diteliti dan untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi merupakan proses mencatat, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pengelolaan dan penyajian data, berbagai transaksi dari kejadian yang berkaitan mengenai keuangan sehingga penggunaannya dapat mengerti serta dapat menggunakan data tersebut sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Akuntansi berasal dari kata *accounting* dapat diartikan mempertanggungjawabkan atau menghitung.

Menurut Thomas Sumarsan (2013:1) menjelaskan bahwa: Akuntansi adalah seni pengumpulan, identifikasi, klasifikasi, dan pencatatan transaksi atau peristiwa keuangan untuk menyediakan suatu informasi, berupa laporan keuangan yang kemudian digunakan oleh para pemangku kepentingan. Metode pencatatan, pengkategorian, analisis dan pengendalian transaksi dan aktivitas keuangan, dan kemudian melaporkan hasilnya. Kegiatan akuntansi, meliputi:

- a. Mengidentifikasi dan mengukur data yang relevan untuk membuat keputusan
- b. memproses data yang berkaitan selanjutnya sebagai pelaporan informasi yang dihasilkan.
- c. Mengkomunikasikan informasi untuk pemakai laporan.

“Akuntansi merupakan pemrosesan pengklasifikasian, pencatatan serta pengikhtisaran kejadian ekonomi dilakukan berbagai cara yang logis untuk tujuan

penyediaan informasi keuangan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan”. Menurut buku *A Statement of Certified Public Accounting (AICPA)* dalam Sofyan Syafri (2013:5) mengartikan akuntansi sebagai berikut “Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi keuangan sebagai sumber informasi yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan berbagai alternatif untuk mengambil suatu keputusan oleh para pemakainya.

“Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi ekonomi secara logis yang bertujuan dalam penyediaan informasi keuangan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.” According to Sofyan Syafri's (2013:5) book *A Statement of Certified Public Accounting (AICPA)*, akuntansi is defined as follows. “Akuntansi adalah proses identifikasi, mengukur, dan menyampaikan”

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

ASP adalah suatu entitas yang mempunyai keunikan sendiri. Sektor publik mempunyai potensi ekonomi yang terbilang sangat tinggi oleh karena sektor publik bisa dikatakan sebagai entitas. organisasi sektor publik melaksanakan berbagai transaksi keuangan serta ekonomi, namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, misalnya perusahaan komersial / swasta yang berfokus atau bertujuan mencari keuntungan, dimana organisasi sektor publik bertujuan dan berfokus untuk pelayanan publik bukan untuk mencari keuntungan. Dalam sudut pandang ilmu ekonomi, organisasi sektor publik dapat diartikan sebagai sebuah entitas yang bergerak dibidang usaha yang bertujuan untuk

penyediaan barang/jasa dan pelayanan publik guna pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat / publik.

Organisasi sektor publik mempunyai kesamaan dengan sektor swasta. Keduanya memanfaatkan sumber daya yang serupa guna mencapai tujuannya dan memiliki proses pengendalian yang hampir sama. Namun, dalam beberapa hal sektor swasta tidak mampu menggantikan fungsi organisasi sektor publik, contohnya dalam fungsi pemerintahan. Indra Bastian (2014:6) mengartikan bahwa “Akuntansi Sektor Publik merupakan teknik mekanisme dan analisa akuntansi yang ditetapkan terhadap pengelolaan anggaran masyarakat di berbagai instansi tinggi negara beserta berbagai departemen yang berada di bawah kendalinya, BUMN, Pemerintah Daerah, BUMD, LSM serta yayasan sosial terhadap berbagai proyek kerjasama swasta dan pemerintah”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2015:14) mengartikan “Akuntansi Sektor Publik adalah sarana informasi yang baik untuk pemerintah sebagai manajemen serta sarana informasi kepada publik”. Sedangkan menurut Halim (2014:18) mendefinisikan “Akuntansi Sektor Publik adalah suatu kegiatan jasa yang bergerak dalam penyediaan informasi kuantitatif atau berupa angka atau yang berbentuk keuangan dari organisasi pemerintah untuk pengambilan keputusan ekonomi yang logis dari pihak pemakai laporan keuangan atas berbagai alternatif tujuan suatu keputusan”. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknis, alat informasi akuntansi, yang sesuai untuk pengelolaan dana masyarakat informasi, baik sebagai alat manajemen pemerintah maupun alat informasi bagi masyarakat.

Akuntansi sektor publik dapat dikatakan sebagai entitas yang kegiatannya berfokus pada penyediaan barang / jasa kepada publik, khususnya keputusan keuangan, dalam rangka memberikan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. Sektor publik muncul dalam berbagai bentuk sosial, yang sebagian besar adalah organisasi pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sektor publik menjalankan kegiatannya dalam bentuk yayasan, lembaga-lembaga keagamaan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), partai politik, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

2.1.3 Pariwisata

2.1.3.1 Pengertian Pariwisata

Secara umum, definisi pariwisata merupakan seluruh kegiatan dan aktivitas perjalanan yang dilakukan manusia, yang dilakukan individu maupun kelompok, dari daerah ke daerah lain secara sementara dalam rangka mendapatkan perasaan aman, damai, tenang, tentram, dan bahagia. Pendapat lain mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dari sebuah tempat ke tempat lainnya yang dilakukan manusia dalam jangka waktu tertentu dengan perencanaan sebelumnya, yang bertujuan untuk menenangkan diri dan berekreasi lalu kembali ke tempat asal.

Secara universal, penafsiran pariwisata adalah seluruh aktivitas serta kegiatan perjalanan yang dicoba oleh manusia, baik individu ataupun kelompok, dari satu tempat ke tempat lain secara sementara. sedangkan dengan tujuan buat memperoleh penyeimbang, kedamaian, ketenangan, keserasian, serta kebahagiaan

jiwa. Definisi lainnya pariwisata merupakan aktivitas ekspedisi dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dicoba oleh manusia dalam jangka waktu tertentu dengan perencanaan tadinya, dimana tujuannya untuk tamasya ataupun merasa bahagia kemudian kembali ke tempat dini.

Secara etimologis, sebutan pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu kata“ Pari” yang apabila diartikan adalah bersama ataupun berkelana, serta“ wisata” yang maksudnya ekspedisi. Sehingga jika dilihat dari asal katanya, pariwisata dapat didefinisikan sebagai sesuatu kegiatan ekspedisi berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain yang menjadi objek tujuan wisata dimana ekspedisi tersebut dicoba dengan perencanaan sebelumnya. dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pariwisata adalah suatu kebutuhan manusia yang dapat memberi ketenangan jiwa. Dengan berpariwisata, maka suasana hati seseorang dapat berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya menambah pengetahuan dan kecintannya terhadap alam.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisataaan, kepariwisataan merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yang bersifat multidisiplin dan multidimensi yang timbul serta dibutuhkan oleh setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, para wisatawan, pengusaha, Pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 2009 mengenai kepariwisataan, Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang pada dasarnya memiliki fungsi sebagai pariwisata atau berpotensi dalam mengembangkan pariwisata dan berpengaruh penting dalam banyak aspek, misalnya pertumbuhan ekonomi, budaya dan sosial,

daya dukung lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan serta pemberdayaan sumber daya alam.

a. Tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah

Pemerintah Daerah sebagai penyedia fasilitas memiliki fungsi yang strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangan pariwisata melalui kepemimpinan institusinya dalam hal perencanaan, pembangunan, pengeluaran kebijakan pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan, sehingga pariwisata daerah membutuhkan perhatian lebih terutama untuk aset-aset pariwisata yang berpotensi. Tidak hanya memiliki nilai historis bahkan memiliki aset wisata berpotensi ekonomi.

Dalam UU No. 10 tahun 2009 mengenai Kepariwisata dijelaskan sebagai berikut:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

1. menyediakan informasi mengenai kepariwisataan, keamanan serta perlindungan hukum dan keselamatan terhadap wisatawan;
2. terciptanya iklim kondusif dalam mengembangkan usaha kepariwisataan dan meliputi terciptanya peluang yang sama dalam menjalankan usaha, memberikan kepastian hukum serta menyediakan fasilitas;
3. pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan aset negara sehingga aset berpotensi yang belum dikelola dapat menjadi daya tarik wisata;
4. pengawasan dan pengendalian aktivitas pariwisata untuk menanggulangi dan mencegah segala pengaruh negatif untuk masyarakat luas.

Pemerintah daerah berwenang:

1. menetapkan serta menyusun perencanaan utama dalam membangun pariwisata nasional;
2. mengoordinasikan dalam membangun pariwisata lintas provinsi dan lintas sektor;
3. penyelenggaraan kerja sama internasional dalam bidang pariwisata menurut ketentuan peraturan undang-undang;
4. penetapan daya tarik pariwisata negara;
5. penetapan tujuan wisata pada negara;
6. penetapan standar, norma, pedoman, kriteria, proses serta sistem pengawasan untuk menyelenggarakan kepariwisataan;
7. pengembangan kebijakan dalam mengembangkan SDM pada bidang pariwisata;
8. pemeliharaan, pelestarian, serta pengembangan aset negara sehingga aset berpotensi yang belum dikelola dapat menjadi daya tarik wisata;
9. memfasilitasi dan melakukan serta mempromosikan pariwisata negara;
10. pemberian kemudahan untuk mendorong wisatawan dalam melakukan kunjungan ;
11. memberikan peringatan dini atau informasi yang terhubung dengan keselamatan dan keamanan wisatawan;
12. meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta potensi usaha yang dimiliki masyarakat;

13. pengawasan, pemantauan, dan pengevaluasian dalam menyelenggarakan kepariwisataan; dan
14. pengalokasian pendanaan kepariwisataan.

Pemerintah provinsi berwenang:

1. penyusunan dan penetapan perencanaan utama dalam membangun kepariwisataan provinsi;
2. mengoordinasikan dalam rangka menyelenggarakan kepariwisataan di daerahnya;
3. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan pencatatan pendaftaran usaha kepariwisataan;
4. penetapan tujuan pariwisata pada provinsi;
5. penetapan daya tarik kepariwisataan provinsi;
6. memberikan fasilitas dalam mempromosikan destinasi wisata serta produk wisata yang berada di daerahnya;
7. pemeliharaan aset provinsi yang menjadi daya tarik kepariwisataan provinsi; serta
8. pengalokasian pendanaan kepariwisataan

Pemerintah kabupaten / kota berwenang:

1. penyusunan dan penetapan perencanaan utama dalam membangun kepariwisataan kabupaten/kota;
2. penetapan destinasi pariwisata di kabupaten/kota;

3. penetapan daya tarik wisata di kabupaten/kota;
4. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan pencatatan pendaftaran usaha kepariwisataan;
5. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
6. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
7. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
9. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
10. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
11. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pemerintah kabupaten / kota berkewajiban:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya dan terbukanya informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
2. Dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi, Pemerintah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan nasional.
3. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

b. Jenis objek wisata

Menurut UU no 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia tuhan yang maha esa, serta peninggalan sejarah,

seni, dan juga budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam undang-undang diatas, yang termasuk obyek dan daya tarik wisata diantaranya adalah:

- 1) Objek daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti: panorama indah, pemandangan alam, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis serta berbagai hewan langka.
- 2) Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pertanian (wisata agro), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan lainnya.
- 3) Sasaran wisata minat khusus, seperti: berburu, mendaki gunung, gua, industri, dan juga kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat ziarah dan lain-lain.
- 4) Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang-bidang tersebut. Dengan demikian pariwisata meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.

Menurut Hadiwijoyo (2012)

Objek dan daya tarik wisata dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Objek Wisata Alam

Objek wisata alam merupakan sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya.

2) Objek wisata sosial budaya

Objek wisata sosial budaya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata meliputi museum, peninggalan sejarah, situs arkeologi, upacara adat, kerajinan dan seni pertunjukkan.

3) Objek Wisata Minat Khusus

Objek wisata minat khusus merupakan jenis wisata yang baru dikembangkan di Indonesia. Wisata ini lebih diutamakan pada wisatawan yang memiliki motivasi khusus.

2.1.4 Pajak Sektor Pariwisata

Menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 tahun 2009, Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Ruang lingkup industri pariwisata menyangkut berbagai sektor ekonomi. Adapun aspek-aspek yang tercakup dalam industri pariwisata antara lain:

1. Restoran.

Di dalam bidang restoran, perhatian antara lain dapat diarahkan pada kualitas pelayanan, baik dari jenis makanan maupun teknik pelayanannya.

Di samping itu, dari segi kandungan gizi, kesehatan makanan dan

lingkungan restoran serta penemuan makanan-makanan baru dan tradisional baik resep, bahan maupun penyajiannya yang bias dikembangkan secara nasional, regional, bahkan internasional.

2. Penginapan

Penginapan atau *home stay* yang terdiri dari hotel, motel, resort, *time sharing*, wisma-wisma dan *bed and breakfast*, merupakan aspek-aspek yang dapat diakses dalam pengembangan bidang kepariwisataan.

3. Pelayanan perjalanan

Pelayanan perjalanan ini meliputi biro perjalanan, paket perjalanan (tour wholesalers), perusahaan incentive travel dan reception service.

4. Transportasi

Transportasi ini dapat berupa sarana dan prasarana angkutan wisata seperti mobil/bus, pesawat udara, kereta api, kapal pesiar, dan sepeda.

5. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Daerah tujuan wisata dapat berupa penelitian pasar dan pangsa, kelayakan kawasan wisatawan, arsitektur bangunan, dan engineering, serta lembaga keuangan.

6. Fasilitas Rekreasi

Meliputi pengembangan dan pemanfaatan taman-taman Negara, tempat perkemahan (camping ground), ruang konser, teater, dan lain-lain.

7. Atraksi wisata

Meliputi taman-taman bertema, museum-museum, hutan lindung, agrowisata, keajaiban alam, kegiatan seni dan budaya, dan lain sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan bersumber pada definisi serta ruang lingkup sektor pariwisata diatas bahwa yang termasuk dalam pajak sektor pariwisata adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.5 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak yang dimiliki oleh daerah dan mampu meningkatkan nilai kekayaan bersih pada satu periode Anggaran (UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan wilayah), pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dana perimbangan pusat serta daerah, yang bersumber dari daerah itu sendiri yang merupakan pendapatan asli daerah dan lain- lain pendapatan yang sah. (UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, merata, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka membiayai penyelenggaraan desentralisasi, dengan pertimbangan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (UU.No 32 Tahun 2004).

2.1.5.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan undang-undang yang berlaku. Pendapatan daerah mempunyai peranan yang sangat besar, Karena dengan mengacu pada pendapatan ini dapat diukur sejauh apa suatu daerah bisa

membiayai aktivitas pemerintah serta pembangunan wilayah (Baldrick, 2017: 23) Pendapatan asli daerah (PAD) ialah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam daerah itu sendiri. Semakin besar peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut dalam mengelola keuangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah itu sendiri (Carunia, 2017: 119). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pendapatan daerah adalah, retribusi wilayah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dapat dikatakan berhasil untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila presentase pencapaiannya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 2). Untuk meningkatkan suatu pendapatan Asli daerah supaya dapat mendekati atau mungkin sama dengan penerimaan potensial pendapatan asli daerah, ada banyak cara yang dapat digunakan untuk memaksimalkan peningkatan PAD, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu dengan mengukur potensi dengan sangat akurat maka target penerimaan pun akan mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara pengadaan penggalian sumber-sumber objek pajak atau menarik wajib pajak yang baru (Carunia, 2017: 30).

Sebagaimana uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah merupakan suatu sumber biaya bagi pembangunan daerah pada saat ini masih belum cukup memberikan kontribusi bagi pertumbuhan daerah, dalam hal ini pemerintah daerah perlu menggali dan meningkatkan potensi pendapatan daerah khususnya sumber

pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dalam rangka memberi keleluasaan pada suatu daerah dalam menggali pembiayaan untuk melaksanakan otonomi daerah atas wujud asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Sumber pertama dari PAD adalah pajak daerah. menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, dan kemudian diartikan sebagai pajak, merupakan kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang pada badan atau orang pribadi dan berupa paksaan yang diatur oleh peraturan perundangan, selanjutnya secara tidak langsung mendapatkan imbalan, serta dipergunakan sebagai kebutuhan daerah yang besar bagi kesejahteraan rakyat. Pajak ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun jenis-jenisnya yaitu:

1. Pajak Hotel

Jenis yang pertama dari pajak daerah adalah pajak hotel, pajak hotel biasanya akan dikenakan atas jasa pelayanannya. Pelayanan tersebut adalah termasuk semua jenis jasa dan fasilitas yang ditawarkan pada harga atau *rate* hotel.

2. Pajak Restaurant dan Rumah Makan

Jenis yang kedua adalah restaurant dan rumah makan. Pajak dari restaurant dan rumah makan ini biasanya bersumber dari pelayanan yang diberikan. Pajak tersebut dibebankan saat kita membeli suatu makanan dari restoran atau rumah makan tersebut, pelanggan akan dikenakan pajak sebesar 10% dari

total harga makanan yang kita beli. Pajak tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Pajak Hiburan

terakhir adalah pajak hiburan umumnya dikenakan pada proses penyelenggaraannya. Pajak hiburan yaitu, semua jenis pertunjukan, penerimaan, atau pementasan yang dapat ditonton atau dinikmati orang dengan biaya tertentu.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/ Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/ Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C/ mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari: Asbes; Batu tulis; Batu setengah permata; Batu kapur; Batu apung; Batu permata; Bentonit; Dolomit; Feldspar; Garam batu (halite); Grafit; Granit/andesit; Gips; Kalsit; Kaolin; Leusit; Magnesit; Mika; Marmer; Nitrat; Opsidien; Oker; Pasir dan kerikil; Pasir kuarsa; Terlit; Fosfat; Talk; Tanah serap (fullers earth); Tanah diatome; Tanah liat; Tawas (alum); Tras; Yarosif; Yeolit; Basal; Trakkit; dan Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah yang dimaksudkan disini yaitu air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

b. Retribusi Daerah

Sumber kedua untuk PAD berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Terdapat beberapa kelompok retribusi yang bisa dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah. Adapun, kelompok di dalam retribusi bisa kamu lihat pada poin penjelasan di bawah ini:

1. **Retribusi Jasa Umum**

Untuk retribusi jasa umum ini dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Penjasannya adalah berperan sebagai retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan pemanfaatan umum.

2. **Retribusi Jasa Usaha**

Jenis yang kedua ini merupakan retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut konsep komersial. Hal ini disebabkan sektor swasta pun bisa menyediakannya.

3. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Terakhir ada retribusi yang dijelaskan sebagai pungutan daerah untuk pembayarannya atas pemberian izin tertentu. Biasanya khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4. **Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan**

Selanjutnya pada sumber PAD ada pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah suatu komponen kekayaan negara yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini adalah sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari Penerimaan daerah itu sendiri, dimana berasal dari bagi hasil laba dari BUMD,

bagi hasil laba dari instansi perbankan, bagi hasil laba atas penyertaan modal terhadap badan usaha lain.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Terakhir ada lain-lain PAD yang sah. Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. berdasarkan Undang-Undang Pasal 6 Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Keempatnya akan bersinergi sehingga akan menghasilkan PAD yang mampu menunjang jalannya perekonomian di sebuah daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah juga sangat berpengaruh baik bagi jumlah penduduk maupun pengeluaran pemerintah.

2.1.5.2 Dana perimbangan

merupakan anggaran yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) atas wujud dari kepercayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah untuk melaksanakan asas Desentralisasi. Adapun tujuan dari Dana Perimbangan, yaitu:

- a. Membantu Pemerintah Daerah dalam membiayai wewenangnya
- b. meminimalisir penyimpangan sumber pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah
- c. meminimalisir kesenjangan pembiayaan pemerintah antar daerah.

Adapun jenis dana perimbangan yaitu:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah menurut angka persentase tertentu yang bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin artinya, DBH dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, sedangkan daerah lainnya (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Dana bagi hasil terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak terdiri atas:
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
2. Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

- a) Kehutanan;
 - b) Pertambangan umum;
 - c) Perikanan;
 - d) Pertambangan minyak bumi;
 - e) Pertambangan gas bumi; dan
 - f) Pertambangan panas bumi.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU atau disebut juga *General Allocation Grant* adalah Dana Perimbangan yang dialokasikan guna meratakan kemampuan keuangan antar suatu daerah untuk mendanai kepentingan atau pengeluaran daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU NO.33 tahun 2004 Pasal 29 Proporsi DAU antar Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten / Kota. Hal ini tentunya untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri.

DAU digunakan untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan / kesenjangan fiskal keuangan vertikal Pusat-Daerah dan ketimpangan atau kesenjangan horizontal antar-daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah sehingga tercipta stabilitas aktivitas perekonomian di daerah.

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan

khusus yang merupakan Urusan Daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN. Kewenangan DAK tidak diserahkan kepada daerah tetapi berada di pemerintah pusat. Implikasi DAK adalah lebih kepada pelayanan dasar untuk masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah”, meliputi seluruh pendapatan daerah diluar PAD dan pendapatan transfer. Pendapatan jenis ini dapat meliputi hibah, dana darurat, atau pendapatan-pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di Pasal 285 ada disebutkan tiga jenis sumber pendapatan daerah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

2.1.6 Kontribusi, Pertumbuhan, Dan Efektivitas

2.1.6.1 Pengertian kontribusi

pengertian kontribusi secara teoritis mungkin masih sangat asing untuk dipahami oleh masyarakat awam. Bagi masyarakat awam kontribusi merupakan sumbangsih atau peran, maupun keikutsertaan seseorang untuk suatu aktivitas tertentu. Para ahli banyak mendefinisikan kontribusi menurut sudut pandang mereka sendiri. Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar kata “masyarakat harus ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah” arti dari kontribusi disini mengandung arti bahwa adanya keharusan masyarakat untuk ikut serta baik dalam bentuk tenaga, fikiran dan kepedulian terhadap suatu program atau kegiatan yang dilakukan pihak tertentu. Kontribusi tidak dapat diartikan hanya sebagai

keikutsertaan seseorang secara formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata atau aksi nyata bahwa orang atau kelompok tersebut ikut membantu ikut turun ke lapangan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Bentuk kontribusi yang bisa diberikan oleh masyarakat harus sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing orang tersebut. Individu atau kelompok bisa menyumbangkan pikirannya, tenaganya, dan materinya demi melaksanakan kegiatan yang direncanakan demi untuk mencapai tujuan bersama. Itulah pengertian kontribusi secara umum.

Definisi kontribusi dalam kamus ilmiah karangan Dany H, mengartikan “kontribusi selaku sokongan berbentuk duit ataupun sokongan” justru dalam penafsiran tersebut mengartikan kontribusi ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih kecil lagi adalah kontribusi selaku wujud dorongan yang dikeluarkan oleh orang ataupun kelompok dalam wujud biaya saja ataupun sokongan dana. Serupa dengan penafsiran kontribusi bagi Dany H, Yandianto dalam Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan kontribusi selaku wujud iuran uang ataupun dana pada suatu forum, perkumpulan serta lain sebagainya”.

Jadi dapat disimpulkan bersumber pada kedua penafsiran diatas jika kontribusi adalah wujud dorongan nyata berbentuk uang terhadap sesuatu aktivitas tertentu buat menggapai tujuan bersama yang sudah diresmikan sebelumnya. Tetapi, sepertinya kontribusi tidak hanya dimaksud selaku wujud dorongan dana ataupun modul saja. perihal ini menghalangi wujud kontribusi itu sendiri. Artinya, hanya orang-orang yang mempunyai uang saja yang dapat melaksanakan kontribusi, sebaliknya kontribusi disini dimaksud selaku

keikutsertaan ataupun kepedulian orang ataupun kelompok terhadap sesuatu aktivitas.

Jadi penafsiran dari kontribusi sendiri merupakan tidak terbatas pada pemberian dorongan berbentuk uang saja, melainkan dorongan dalam wujud lain seperti dorongan tenaga, dorongan pemikiran, dorongan modul, serta seluruh wujud dorongan yang akan mendorong suksesnya aktivitas yang sudah direncanakan guna mencapai tujuan bersama. Tidak sedikit penafsiran kontribusi berdasarkan konsep-konsepnya. Sebutan kontribusi sering kali berhubungan dengan kajian ilmu manajemen. kontribusi sering kali dijadikan variabel leluasa (variabel x) yang pengaruhi variabel bergantung ataupun variabel terikat(variabel Y). bisa dihitung dengan rumus selaku berikut sesuai riset Vita Amaliah Hakim pada tahun 2013:

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{pajak sektor pariwisata}_n}{\text{total PAD}_n} \times 100\%$$

keterangan

kontribusi	:	persentase pajak sektor pariwisata terhadap total pendapatan daerah.
Pajak Sektor Pariwisata _n	:	besarnya pajak sektor pariwisata dalam tahun n
Total PAD _n	:	Total PAD tahun n

2.1.6.2 Pertumbuhan

Pertumbuhan berguna untuk mengukur bertambahnya laju pertumbuhan dari penerimaan pajak sektor pariwisata. Laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dengan rumus dibawah ini sesuai dengan penelitian Vita Amaliah Hakim pada tahun 2013:

$$G_X = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}}$$

Keterangan

- G_x : Laju pertumbuhan pajak sektor pariwisata
Pertahun.
- X_t : Realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata
pada tahun tertentu.
- $X_{(t-1)}$: Realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata
pada tahun sebelumnya.

2.1.6.3 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan keaktifan, daya guna, adanya keserasian dalam melaksanakan tugas atau aktivitas dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantar keduanya. efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. sedangkan efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai,

Makmur (2011:5) mengartikan efektivitas sebagai tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan. Menurutnya untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang,, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada Negara kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data

angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu dapat ditarik kesimpulan. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim pada tahun 2013:

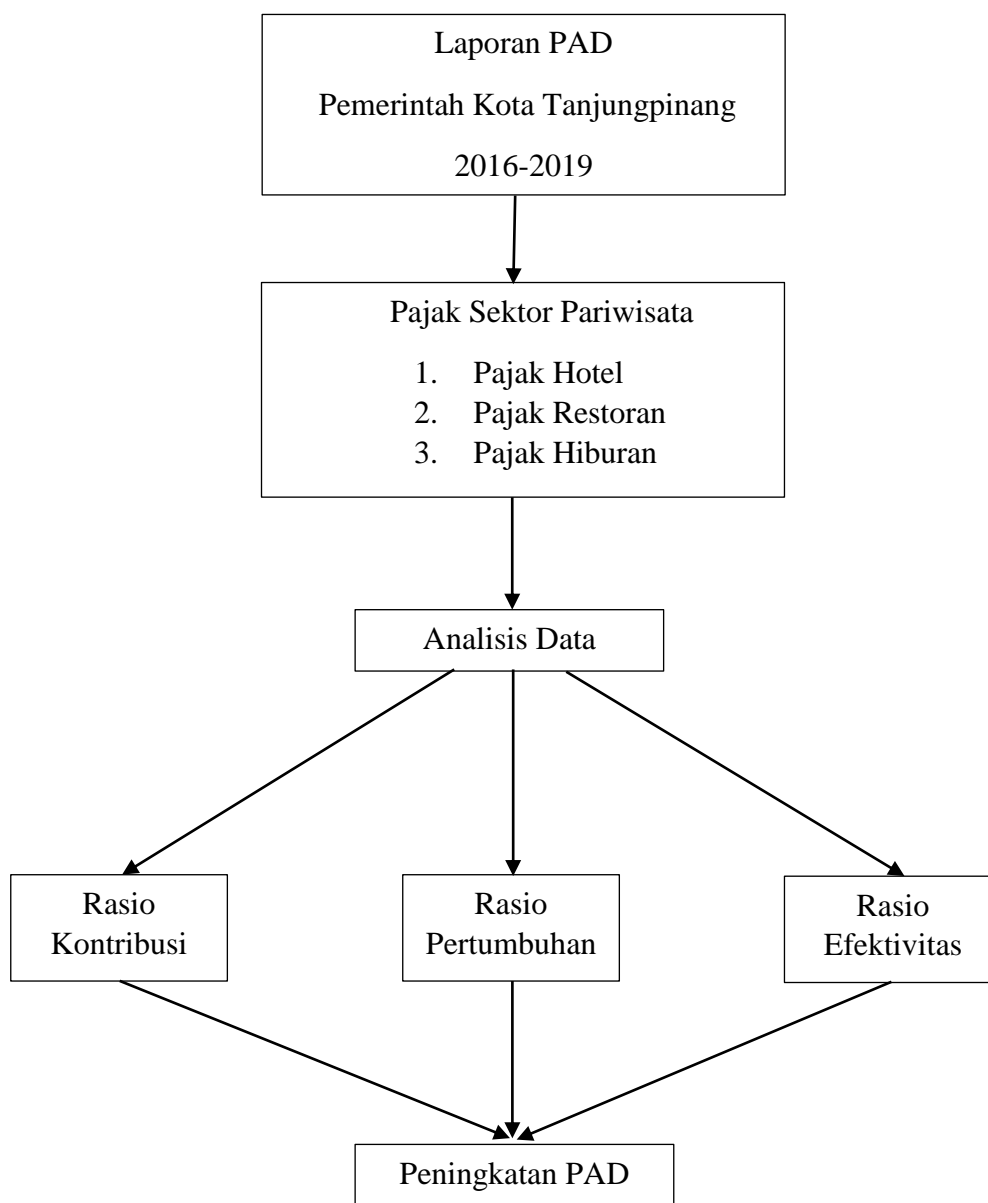
$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Sektor Pariwisata}}{\text{Target Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Majunya penerimaan pendapatan perkapita dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari pembangunan di semua sektor. Sektor pariwisata adalah suatu sektor yang cukup penting dalam menaikkan penerimaan retribusi daerah, yang turut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Tanjungpinang. pajak sektor pariwisata yaitu: pajak pemeliharaan tempat obyek wisata, pajak jasa penginapan / hotel, pajak restoran dan rumah makan dalam mendorong investasi swasta di bidang perhotelan guna menunjang kebutuhan wisata domestik dan non domestik untuk mengunjungi dan lama menginap di wilayah kota Tanjungpinang.

pembangunan pada sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan daya ekonomi masyarakat dalam bidang budaya, kerajinan dan seni serta dapat meningkatkan peluang kerja di sektor pariwisata untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta dapat bermanfaat bagi masyarakat yang berada di daerah obyek wisata. Berikut ini skema kerangka pemikiran untuk mengetahui potensi wisata yaitu:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber: Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2020)

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa studi terdahulu mengenai analisis pendapatan sektor pariwisata menunjukkan adanya perkembangan pendapatan pada sektor pariwisata di Indonesia. Penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jurnal internasional

1. (Nur Indah Kurnisari, 2014) dengan judul penelitian “Peranan Retribusi Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pada Wisata Religi Makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik)” yang didasarkan pada peraturan undang-undang republik indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh retribusi tempat wisata Sunan Giri terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2009-2013 dan factor- factor yang menyebabkan terjadinya perubahan kontribusi setiap tahun, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasilnya adalah pada tahun 2009 dan 2010 untuk tingkat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk kriteria kurang yaitu sebesar 17,82% dan 17,88%, tahun 2011 mulai naik dalam kriteria Sedang yaitu sebesar 22,15%, kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 18,71 % dalam kriteria Kurang, sedangkan untuk tahun 2013 kriterianya adalah sedang yaitu naik menjadi 20,89%.
2. (Ni Nyoman Suarti dan Made Suyana Utama, 2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar” dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara serempak dan parsial jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan dan PHR terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar, dan mengetahui pengaruh dominan dari ke tiga variabel bebas terhadap PAD Kabupaten

Gianyar. Dengan metode regresi linier berganda. Hasilnya adalah penelitian menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 1991 -2010.

3. (Devilian Fitri 2014) dengan judul “Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir Selatan” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, mengetahui pengaruh sarana akomodasi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, mengetahui pengaruh tempat belanja tourist terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, dan mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, sarana akomodasi dan tempat belanja tourist di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Hasilnya adalah, pertama tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di 9 Kabupaten Pesisir Selatan, kedua sarana akomodasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, ketiga tempat belanja tourist berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah, dan yang keempat Jumlah wisatawan, sarana akomodasi dan tempat belanja tourist secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. (Rahma & Handayani, 2013) yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata, dan pendapatan perkapita terhadap PAD di Kabupaten Kudus. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat, variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata, dan yang terakhir pendapatan perkapita. Kesimpulan atau hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh rahma dan handayani ini adalah semua variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten kudus, adapun alat analisis yang digunakan dalam mengukur tingkat pengaruh variabel X adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.
 5. (Deny, 2013) Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel, dan PDRB Terhadap Retribusi Pariwisata Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. Dalam penelitian ini menggunakan variabel Y yaitu Retribusi Pariwisata dan variabel X yaitu jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata, jumlah hotel, dan jumlah PDRB dengan menggunakan alat analisis Uji goodnes of hit. Hasil dalam penelitian ini adalah semua variabel X secara signifikan mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah di jawa tengah.
- b. jurnal internasional
1. (Rini Yuliandari, Taufik Chaidir, dan Hadi Mahmudi, 2017) dengan judul penelitian "*The Analysis Of Effectivity And Efficiency Of Tax Collection From Hotels And Restaurants In Order To Increase The Original Regional Income (PAD) In Mataram*". Penelitian ini bertujuan untuk menemukan

dampak, efisiensinya, penampilannya Serta sumbangan pajak dari hotel dan restoran ke arah pendapatan regional asli di Mataram dari 2011 sampai 2016. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif untuk studi kasus sebagai pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa dampak dan efisiensi pengumpulan pajak dari hotel dan Restoran di Mataram dianggap dalam kategori yang efektif dan efisien. Sementara itu, sumbangan dari koleksi pajak hotel dan restoran pajak regional adalah 0,27% dan 0,13% terhadap pendapatan asli regional, sehingga pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang baik pada pajak regional dan Pendapatan daerah asli di Mataram. Selain itu, kinerja hotel dan pajak restoran dalam kategori berkembang.

2. (Febri Umar Doni, 2015) dengan judul “*Analysis Of Influencing Factors Regional Original Revenue (PAD) In The Provincial Government Of DKI Jakarta*”. tujuan dari studi ini adalah untuk:
 - a) Mendapatkan Bukti empiris pengaruh masyarakat terhadap pendapatan daerah,
 - b) Dampak GRDP terhadap pendapatan lokal,
 - c) Mendapatkan gambaran tentang dampak pengeluaran pemerintah pendapatan daerah,
 - d) Menggambarkan dampak populasi, GRDP Dan pengeluaran pemerintah untuk pendapatan daerah,
 - e) Untuk menganalisa Pengaruh Total populasi, GRDP dan Pengeluaran pemerintah untuk pendapatan lokal.

Dalam teknik sampling ini, Peneliti menggunakan sampling sengaja dilakukan dengan mengambil Subyek tidak berdasarkan strata, acak atau daerah tapi berdasarkan Dapatkan contoh laporan keuangan Jakarta yang akan Diperiksa adalah data dari 2001 sampai 2014. Hasilnya memperlihatkan bahwa:

- a) sebagian mengandung efek negatif tetapi bukan bilangan signifikan Dari penduduk berpenghasilan regional,
- b) sebagian tidak positif Efek tapi tidak signifikan GRDP terhadap pendapatan lokal,
- c) Sebagian isinya positif dan signifikan dampak pemerintah Pengeluaran pendapatan lokal,
- d) secara bersamaan ada Pengaruh positif dan signifikan antara populasi, GRDP dan Belanja pemerintah untuk pendapatan regional.
- e) Pengaruh Total populasi, GRDP dan belanja pemerintah untuk lokal Pendapatan meningkat 92,7% sementara sisanya 7,3% Dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini sama-sama membahas pengaruh industri pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditinjau dari jumlah pengunjung wisata, jumlah obyek wisata dan jumlah hotel, namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian sekarang dilakukan di Kota Tanjungpinang dan menggunakan rumusan masalah yang berbeda.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian mengenai Analisis Pajak Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang yang diuraikan dalam bab ini.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif dengan menggunakan rumus rasio, merupakan jenis penelitian tentang subjek tertentu dimana subjek tersebut terbatas, maka kesimpulan yang diperoleh hanya berlaku sebatas pada subjek yang diteliti.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dengan tujuan selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, data ini mudah ditemukan secara cepat melalui perantara pihak lain atau bukan dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini data sekunder adalah berupa data target dan data realisasi penerimaan retribusi sektor pariwisata tahun 2014-2018 dan berbagai macam dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

3.3 Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data. metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara mencatat data penelitian yang terdapat dalam catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian

Penelitian ini juga menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, dan data-data yang diperoleh melalui media internet. Melalui studi kepustakaan ini, peneliti berharap dapat memperoleh data dan informasi yang lebih akurat dan mendalam yang berkaitan dengan pajak sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

3.4 Teknik Pengelolaan Data

3.4.1 Menghitung Kontribusi Pajak Sektor Pariwisata

Kontribusi kerap kali dijadikan variabel bebas (variabel x) yang mempengaruhi variabel tergantung atau variabel terikat (variabel Y). kontribusi dapat diukur dengan menggunakan rumus dibawah ini sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim pada tahun 2013:

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{pajak sektor pariwisata}_n}{\text{total PAD}_n} \times 100\%$$

keterangan

kontribusi : persentase pajak sektor pariwisata terhadap total pendapatan daerah.

Pajak Sektor Pariwisata_n : besarnya pajak sektor pariwisata dalam tahun n.

Total PAD_n : Total PAD tahun n.

Tabel 3.1

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

persentase	kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
30-40%	Sedang
40-50%	Cukup Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

3.4.2 Mengukur Tingkat Pertumbuhan Pajak Sektor Pariwisata

Laju pertumbuhan pajak sektor pariwisata dapat dihitung dengan rumus efektivitas pajak daerah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vita Amalia Hakim pada tahun 2013:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}}$$

Keterangan

G_x : Laju pertumbuhan pajak sektor pariwisata
Pertahun.

X_t : Realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata
pada tahun tertentu.

X_(t-1) : Realisasi penerimaan pajak sektor pariwisata

pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.2

Klasifikasi Kriteria Pertumbuhan

persentase	kriteria
85-100%	Sangat Berhasil
70-85%	Berhasil
55-70% %	Cukup Berhasil
30-55%	Kurang Berhasil
>30%	Tidak Berhasil

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.237

3.4.3 Mengukur Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Sektor Pariwisata

Untuk mengukur tingkat keefektivasan pemungutan pajak sektor pariwisata dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas pajak daerah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vita Amalia Hakim pada tahun 2013:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata}}{\text{Target Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata}} \times 100\%$$

Tabel 3.3

Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.237

3.5 Metode analisis data

- a. Mengidentifikasi data-data yang diperlukan
- b. Melakukan pengukuran pajak sektor pariwisata dengan menggunakan rumus rasio.
- c. Menganalisis pajak sektor pariwisata dalam pendapatan asli daerah. Apakah pajak tersebut meningkatkan PAD.
- d. Membuat kesimpulan dari data dan analisis yang telah dikumpulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andyta Widiyanto. (2012). *Analisis Optimalisasi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.*
- Asriyawati, M. H. (2018). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang.*
- Baldric Siregar. 2017. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2.* Penerbit UPP STIM
- BPS kota Tanjungpinang. (2020). *Kunjungan Wisatawan Tanjungpinang.*
- Denny Cessario Sutrisno. (2013). *Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel, Dan PDRB Terhadap Retribusi Pariwisata Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah.* *Economics Development Analysis Journal, vol 2 no 4.*
- Dhina Handayani. (2012). *Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010.*
- Doni, F. U. (2015). *Analysis Of Influencing Factors Regional Original Revenue (PAD) In The Provincial Government Of Dki Jakarta.*
- Esrarn, M. J. (2006). *Analisis Pasar Pariwisata Dalam Pembangunan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.*
- Femy Nadia Rahma, H. R. H. (2013). *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus.* *Diponegoro Journal of Economics, vol 2.*
- Fitri, D. (2014). *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Pesisir Selatan.*
- dispar.bone.go.id (2019). *Ruang Lingkup Industri Pariwisata.*
- Hadiwijoyo, Surya Sakti. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep).* Yogyakarta : Graha Ilmu
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

KUSUMA, F. H. P. (2018). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pt. Unilever Indonesia Tbk. *Jurnal Akuntansi Unihaz-JAZ*, vol 1, 89.

Luqman Yumna Fauzi. (2018). *Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah*.

Manimpurung, R., Kalangi, L., & Gerungai, N. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 241–250.

MF Arnas. (2020). *Analisis kinerja keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhoksemawe*.

Ni Nyoman Suarti dan Made Suyana Utama, (2013). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.

Nur Kurnia Indah Kurnia Sari. (2014). Peranan Retribusi Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pada Wisata Religi Makam Sunan Giri Di Kabupaten Gresik). *Akuntansi Akunesa*.

RI, B. (2020). *Profil Kota Tanjungpinang*.

Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh. *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 183-191.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah

Yeni Ratnawati. (2016). *Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur*. YKPN. Yogyakarta.

Yuliandri, R., Chaidir, T., & Mahmudi, H. (2017). *The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotel and Restaurant In Order to Increase*

the Original Regional Income (PAD) In Mataram. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Vol.9 No.2.

CURRICULUM VITAE



Nama : Annisa Firlia

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 06 Desember 1998

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Email : Annisafirlia1@gmail.com

Alamat : Jl. Kuantan Perum Graha Kuantan Asri Blok A no 10

Pekerjaan : Belum Bekerja

Pendidikan : - TK Al-Falah Tanjungpinang
- SDN 004 Bukit Bestari
- SMP Negeri 2 Tanjungpinang
- SMAN 2 Tanjungpinang
- STIE Pembangunan Tanjungpinang (S1)